

Judul : Ruang Fiskal RAPBN 2027 Menyempit
Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 10

Ruang Fiskal RAPBN 2027 Menyempit

Pemerintah harus mampu meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak agar target penerimaan tahun 2027 bisa tercapai

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah berencana menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 sebagai penyanga ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Di balik agenda itu, ruang fiskal pemerintah menghadapi tekanan akibat meningkatnya pembayaran bunga utang dan target penerimaan yang cukup ambisius.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa, RAPBN 2027 dirancang untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program prioritas pembangunan. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 342,6 triliun dan belanja negara sebesar Rp 409,2 triliun.

Hal itu disampaikan Purbaya saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026). "APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang begitu besar ini masih harus kita jaga," kata Purbaya.

Menurut dia, APBN 2027 memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai peredam guncangan (*shock absorber*) untuk menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Kedua, sebagai instrumen untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus mendukung agenda pembangunan.

APBN 2027 juga diarahkan menjadi katalis pembangunan, terutama melalui investasi dan aktivitas ekonomi. Pemerintah menetapkan delapan kluster Program Kerja Prioritas Nasional, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendirian kesehatan, hilirisasi dan industri, infrastruktur, ketahanan bencana, pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta penurunan kemiskinan.

Agenda tersebut didukung program di bidang pertahanan dan keamanan, peningkatan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Pemerintah tetap mengoptimalkan risiko global meski sejumlah lembaga internasional memprediksi perlambatan dunia menjadi pada 2027. Bank

Dunia memprediksi ekonomi global tumbuh 2,8 persen pada 2027, lebih tinggi ketimbang proyeksi 2,5 persen pada 2026. Adapun Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi dunia tumbuh 3,4 persen pada 2027, dibandingkan dengan 3 persen pada tahun ini.

Kendati demikian, Purbaya mengingatkan, ketidakpastian masih tinggi, terutama akibat konflik geopolitik. "Perkembangan kondisi global masih sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi hubungan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, masih beresiko," ujarnya.

Genjot penerimaan

Untuk memvokalisasi ruang fiskal bagi program pembangunan, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp 342,6 triliun pada 2027. Target ini meningkat sekitar 6,8 persen dibandingkan dengan outlook pendapatan negara 2026.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar mengenai optimisme penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik, Purbaya mengatakan, pemerintah akan memperkuat kapasitas perpajakan (*tax capacity*). Upaya ini dilakukan melalui peningkatan tata kelola sumber daya manusia dan integrasi data untuk meningkatkan efisiensi dan ekstensifikasi perpajakan. Pemerintah juga akan memperkuat kepatuhan dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Purbaya mengatakan, peningkatan penerimaan akan di tempuh melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan, bukan dengan menaikkan tarif pajak.

"Kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan *tax base*, penguatan *Comptax*, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang menarik untuk mendorong investasi. Jadi, di sini, kita memperbesar *tax base*. Pemerintah sampai sekarang tak ada rencana untuk menaikkan *rate-nya*," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis siang.

Sementara itu, sistem digital juga akan terus dimanfaatkan untuk memperkuat administrasi dan pengawasan penerimaan negara. *Comptax* digunakan untuk administrasi perpajakan, CEISA (*Customs Excise Information System*) untuk kepabeanan dan cukai. Adapun Simbara untuk

mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan penerimaan dari sektor mineral dan batubara.

Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), antara lain melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, serta layanan kementerian dan lembaga.

La menegaskan, peningkatan penerimaan harus berjalan beriringan dengan disiplin dalam pengendalian anggaran. "Setiap rupiah APBN harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Pada saat yang sama, keberpihakan kepada rakyat harus berjalan seiring dengan disiplin dan keberlanjutan fiskal," ujar Purbaya.

Proyeksi defisit

Kendati demikian, target penerimaan tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemerintah menggapai defisit fiskal. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar Rp 67,2 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan outlook defisit APBN 2026 sebesar Rp 73,43 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

Ekonomi Center of Reform on Economics (ECORE) Indonesia, Yusuf Rendi Manik, menilai target tersebut masih mungkin dicapai. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk merealisasikan peningkatan penerimaan, terutama dari sektor perpajakan. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp 259,4 triliun pada 2027, naik 12,1 persen dari outlook 2026 sebesar Rp 231,08 triliun.

Menurut Yusuf, pertumbuhan penerimaan pajak itu cukup ambisius karena jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nominal. Pemerintah, katanya, harus mampu meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak agar target tercapai.

"Ini cukup ambisius jika tidak ada penyusunan kebijakan tarif pajak baru, dan seluruh kenaikan murni diharapkan berasal dari perbaikan kepatuhan atau perluasan basis pajak," ujarnya.

Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, Yusuf menilai, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit untuk mempertahankan defisit di level 2,4 persen. Salah satunya adalah memuluskan belanja di tengah tahun menjadi lebih besar.



Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa (kiri) menyampaikan tanggapan pemerintah dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurut dia, pilihan tersebut berisiko melemahkan komitmen dan investasi yang justru dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurrahman menilai, target penurunan defisit menjadi 2,4 persen dari PDB masih memundikan kendati menghadapi tantangan besar.

Pasalnya, pemerintah berupaya menggapai target sebesar Rp 650,3 triliun untuk pembayaran bunga utang. Angka itu meningkat 11,7 persen dibanding dengan outlook 2026 dan setara dengan sekitar 19 persen dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.362,2 triliun. Akibat tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri Rp 589,6 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 60,7 triliun.

Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi untuk

"Disiplin fiskal seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah tambahan belanja menghasilkan *additionality* (nilai tambah), produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja," kata Rizal.

Bunga utang

Tekanan terhadap ruang fiskal juga datang dari meningkatnya pembayaran bunga utang. Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembayaran bunga utang. Angka itu meningkat 11,7 persen dibanding dengan outlook 2026 dan setara dengan sekitar 19 persen dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.362,2 triliun. Akibat tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri Rp 589,6 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 60,7 triliun.

Pembayaran bunga utang merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi untuk

menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan utang. Besarnya pembayaran dipengaruhi, antara lain, oleh pergerakan nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN), kebutuhan pembiayaan, serta kondisi ekonomi global dan domestik.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardianto, pekan lalu, mengatakan, pemerintah akan membuka portofolio utang secara aktif untuk mencari biaya yang lebih murah dan menjaga risiko tetap terkendali.

Strategi tersebut, antara lain, dilakukan melalui pengelolaan liabilitas menjadi kewenangan utang berjangka pendek dan panjang, serta mendiversifikasi basis investor untuk mengurangi risiko suku bunga, nilai tukar, dan pembayaran kembali (*refinancing risk*).

Pemerintah juga akan memprioritaskan penerbitan SBN di pasar domestik untuk mengu-

rangki risiko skematis. "Dalam rangka mencari pembiayaan, strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur. Kami memprioritaskan pembiayaan dari SBN domestik untuk mengurangi risiko skematis," ujar Ferry.

Pada 2027, kebutuhan pembiayaan utang pemerintah direncanakan mencapai Rp 876,3 triliun, naik 0,9 persen dibandingkan dengan outlook 2026 sebesar Rp 868,1 triliun. Pembayaran utang tersebut terutama berasal dari penerbitan SBN Rp 779,9 triliun dan pinjaman neto Rp 96,3 triliun.

Sementara itu, pembiayaan anggaran dalam RAPBN 2027 ditargetkan Rp 671,2 triliun. Angka ini mencerminkan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBN yang ditargetkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB. Pemerintah juga menargetkan defisit kewenangan primer turun secara signifikan menjadi Rp 219 triliun pada 2027 dari outlook 2026 sebesar Rp 152,1 triliun. (103)